

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*, dimana pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan hasil kinerja dalam berbagai aspek maupun indikator utama seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Suatu bentuk dari transparansi dan akuntabilitas yaitu adanya Laporan Keuangan Pemerintah. Pada tahun 2010 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang perlu diterapkan guna menyusun dan juga menyajikan laporan keuangan pemerintah. Akuntansi berbasis akrual ini memiliki kelebihan antara lain dapat menyajikan informasi dengan lebih lengkap dan juga memenuhi fungsi manajerial pengendalian atau pengawasan.

Dengan adanya sistem akuntansi berbasis akrual pun mampu mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dan tentunya kinerja pemerintah pun akan mengalami banyak perubahan positif. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang mana merupakan sebuah mandate dari pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa Standar Akuntansi Pemerintah ini mampu memberi pengaruh besar terhadap sistem akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

Apapun jenis organisasinya, baik itu swasta maupun publik, selalu terkait dengan anggaran. Anggaran dijadikan salah satu instrument dari mekanisme birokrasi yang mana berguna untuk mengalokasikan sumber daya melalui barang maupun jasa pada suatu organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, anggaran dijadikan salah satu alat dari akuntabilitas dalam melaksanakan program ataupun kegiatan yang didasari atau menggunakan uang publik. Proses untuk mempersiapkan anggaran disebut dengan penganggaran (Mardiasmo, 2009).

Penganggaran merupakan aktivitas yang penting karena dijadikan suatu wadah dalam melakukan alokasi sumber daya bagi program ataupun kegiatan yang terencana. Dalam siklus akuntansi sektor publik, setelah proses dari penganggaran selesai maka anggaran itu akan direalisasikan berdasar pada apa yang direncanakan oleh organisasi publik. Maka dapat di katakan bahwa realisasi anggaran adalah proses dari segala yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh suatu organisasi atau lembaga

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung merupakan lembaga diklat di lingkungan Kementerian Agama. Lembaga ini bergerak sebagai pelaksana teknis dalam bidang pendidikan dan latihan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama, maka Balai Diklat Keagamaan Bandung pun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Di dalam LAKIP, setiap instansi pemerintah termasuk Balai Diklat Keagamaan perlu menyusun realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan adanya

Laporan Realisasi Anggaran maka dapat dilihat bagaimana kondisi kinerja keuangan yang telah dicapai oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung.

TABEL 1. 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2014 SAMPAI TAHUN 2018

Tahun	Anggaran	Kenaikan Anggaran (%)	Realisasi	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	Realisasi (%)
2014	Rp.15.244.887.000	35.85	Rp.15.120.087.824	(Rp.124.799.176)	99.18
2015	Rp.23.766.396.000		Rp.20.661.671.144	(Rp.3.104.724.856)	86.94
2016	Rp.28.688.028.000	17.15	Rp.26.379.319.578	(Rp.2.308.708.422)	91.95
2017	Rp.30.516.006.000	5.99	Rp.27.787.087.284	(Rp.2.728.918.716)	91.06
2018	Rp.30.618.681.000	0.33	Rp.28.447.828.636	(Rp.2.170.852.364)	92.91

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung tahun 2014-2018. (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dalam 5 tahun realisasi anggaran dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terdapat kenaikan dan juga penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2015 terdapat penurunan drastis dari pencapaian realisasi di tahun sebelumnya yaitu 99.18% kemudian turun menjadi 86.94%. Tetapi di tahun 2016 mengalami kenaikan hingga 91.95% namun kembali lagi mengalami penurunan 91.06% di tahun berikutnya. Di tahun 2018 mengalami kenaikan kembali yaitu mencapai 92.91%.

TABEL 1. 2
OPINI BPK TERHADAP KEMENTERIAN AGAMA

Tahun	Opini
2014	WTP DDP
2015	WDP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP

Sumber: <https://kemenag.go.id/>

Keterangan:

- WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian
- WTP DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
- WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian

Data tersebut menunjukkan bahwa selama 5 tahun Kementerian Agama telah dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, meskipun di tahun 2015 mendapat WDP dikarenakan pada tahun itu merupakan kali pertama pengimplementasian akuntansi berbasis akrual di laporan keuangan pemerintah. Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan menyatakan bahwa laporan BPK atas laporan keuangan Kemenag tahun anggaran 2018 tidak ada sesuatu yang serius dan hanya pada tataran Sistem Pengendalian Internal (SPI). (sumber: <https://kemenag.go.id/>)

Maka dari itu, dilihat dari data realisasi anggaran yang mana meskipun sempat terjadi penurunan namun tetap bisa diseimbangkan atau dinaikan kembali di tahun

berikutnya. Dan dalam lingkup Kemenag, laporan keuangannya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, adanya kegiatan pengendalian internal merupakan sesuatu yang mendukung untuk mengontrol realisasi anggaran, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 ayat 1 bahwa dalam melakukan pencapaian terhadap keuangan negara yang dikelola dengan efektif, efisien, akuntabel maka para pemerintah perlu melakukan pengendalian atas segala bentuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Maka dengan adanya pengendalian internal ini maka dapat mengukur serta memberikan kepastian atas kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien dan taat pada peraturan. Sistem pengendalian intern ini mencakup berbagai unsur dan salah satunya yaitu adanya aktivitas pengendalian internal.

Dengan dilakukannya aktivitas pengendalian internal maka dapat memastikan apakah aktivitas penganggaran yang direncanakan telah direalisasikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian realisasi anggaran yang disusun oleh Instansi Pemerintah menjadi hal yang penting sebagai komponen pengukuran kinerja. Dengan adanya aktivitas pengendalian internal dapat membantu memastikan bahwa segala prosedur-prosedur, kebijakan-kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, karena dalam prakteknya, semua karakteristik di penyusunan anggaran memiliki banyak kelemahan, seperti contohnya dalam organisasi publik yang rentan dengan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Dengan demikian segala bentuk aktivitas baik dari perencanaan, kemudian pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dapat dikendalikan. Dengan melaksanakan Aktivitas Pengendalian Internal ditujukan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan dapat memperoleh opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan di instansi, yang mana mencerminkan adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian fenomena positif dan data diatas, maka peneliti tertarik untuk dapat meneliti mengenai pentingnya Aktivitas Pengendalian Internal yang berdampak pada Realisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung. Maka judul yang diangkat oleh peneliti yaitu **“Pengaruh Aktivitas Pengendalian Internal Terhadap Realisasi Anggaran Di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Terlihat dari uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa identifikasi masalah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Persentase realisasi anggaran dari tahun 2014 hingga tahun 2018 meskipun tidak ada yang mencapai 100%, tetapi tetap ada kenaikan-kenaikan yang mencerminkan bahwa anggaran telah direalisasikan dengan baik.
2. Adanya aktivitas pengendalian internal yang dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat dari hasil realisasi anggaran Balai Diklat Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun dan pemeriksaan Laporan

Keuangan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014-2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meskipun pada 2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dari itu peneliti merumuskan masalah penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh Pemisahan Tugas terhadap Realisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat?
2. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Pengolahan Informasi terhadap Realisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Fisik terhadap Realisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat?
4. Seberapa besar pengaruh Review Kinerja terhadap Realisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat?
5. Seberapa besar pengaruh Aktivitas Pengendalian Internal terhadap Realisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Setelah rumusan masalah disebutkan diatas, maka terdapat tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemisahan Tugas terhadap Realisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 2 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengendalian Pengolahan Informasi terhadap Realisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 3 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengendalian Fisik terhadap Realisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 4 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Review Kinerja terhadap Realisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 5 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Aktivitas Pengendalian Internal terhadap Realisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengendalian internal dan realisasi anggaran.
 - b. Dapat memberikan sumbangan ide secara konseptual dan membantu peneliti lain dalam mengumpulkan bahan untuk studi literasi jika akan meneliti judul yang sejenis pada masa yang akan datang .
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti, dilakukannya penelitian ini sudah menjadi salah satu syarat agar lulus dan mendapat gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP).
 - b. Bagi Instansi, hasil dari penelitian ini digunakan untuk menjadi bahan masukan agar lebih mengembangkan pengendalian internal untuk meningkatkan realisasi anggaran.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Anggara (2016: 11) :

“Keuangan negara merupakan berbagai kekayaan yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah, yang diantaranya yaitu terdapat uang, barang, kertas berharga yang dimiliki dan memiliki atau bernilai uang; adanya hak serta kewajiban yang juga bernilai uang; dana dana pihak lain atau disebut pihak ketiga yang mendapat jaminan para pejabat atau pemerintah”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu :

“Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses dari berbagai macam kegiatan atau aktivitas yang secara berkala dilakukan oleh para pimpinan serta semua pegawai guna mampu meyakinkan bahwa tujuan dari organisasi telah tercapai dengan baik dan berjalan secara efektif dan efisien serta pelaporan keuangan yang dapat diandalkan serta sesuai dengan aturan yang berlaku”.

Dalam sistem pengendalian internal pemerintah terdapat salah satu unsur didalamnya ialah adanya aktivitas pengendalian. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rahayu & Suhayati (2010: 230) bahwa dengan melaksanakan aktivitas pengendalian dapat membantu untuk memastikan apakah arahan manajemen dilakukan berdasar pada kebijakan-kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Menurut Rahayu & Suhayati (2010: 230) aktivitas pengendalian internal mencakup beberapa hal mana yang sesuai ataupun relevan dengan laporan keuangan, yaitu diantaranya:

1. Pemisahan tugas
2. Pengendalian pengolahan informasi
3. Pengendalian Fisik
4. Review kinerja

Di dalam laporan keuangan terdapat berbagai komponen dan salah satunya yaitu adanya Laporan Realisasi Anggaran. Menurut Suwanda & Santosa (2015: 56) Laporan Realisasi Anggaran adalah suatu bagian dari laporan keuangan yang mana didalamnya terdapat ikhtisar dari sumber, alokasi serta penggunaan dari sumber daya ekonomi yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah yang cara penyajiannya ialah membandingkan anggaran dengan realisasinya.

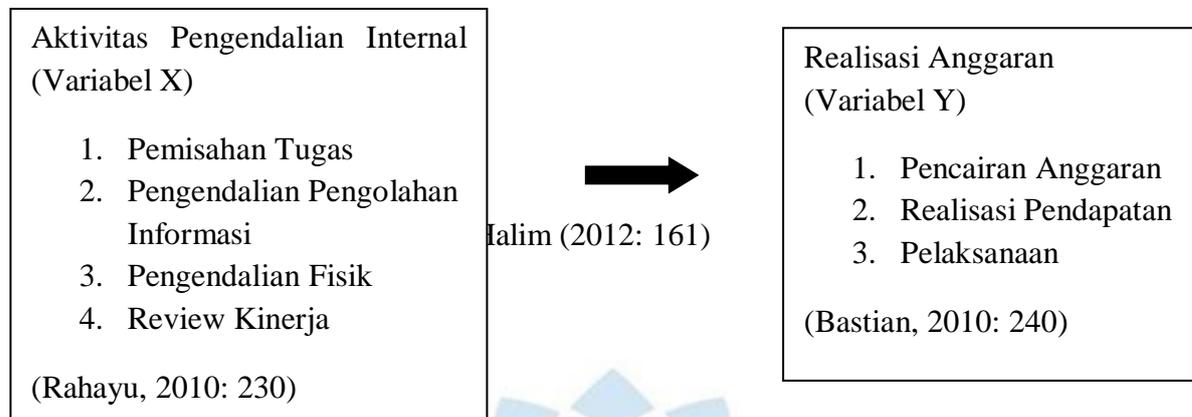
Kemudian di dalam realisasi anggaran terdapat berbagai aspek yang dibutuhkan untuk melaksanakan anggaran. Menurut Ritzman (1990:4) dalam realisasi anggaran terdapat arahan yang menjadi acuan atau adanya pengendalian yang sistematis.

Menurut Bastian (2010: 240) setiap tahapan dari realisasi anggaran publik terbagi dalam beberapa kegiatan utama, yaitu diantaranya:

1. Pencairan anggaran
2. Realisasi pendapatan
3. Pelaksanaan

Oleh karena itu, dalam pengelolaan atau pelaksanaan realisasi anggaran diperlukan aktivitas pengendalian internal yang sistematis sehingga dapat memenuhi karakteristik kualitas pengeluaran dari realisasi anggaran yaitu dapat dipahami serta diandalkan. Selain itu dengan dilaksanakannya aktivitas pengendalian internal maka setiap tahapan realisasi anggaran dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan kebijakan serta prosedur yang berlaku dan juga tidak ada unsur manipulasi atau salah saji material. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikutip oleh peneliti, serta teori-teori yang ada, maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan model kerangka pemikiran yaitu:

GAMBAR 1. 1
MODEL KERANGKA PEMIKIRAN



1.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan serta teori-teori dari para ahli, maka peneliti menarik hipotesis yaitu diantaranya:

1. $H_o : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh dalam Pemisahan Tugas terhadap Realisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan.
 $H_a : \rho \neq 0$ Terdapat pengaruh dalam Pemisahan Tugas terhadap Realisasi Anggaran.
2. $H_o : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh dalam Pengendalian Pengolahan Informasi terhadap Realisasi Anggaran.
 $H_a : \rho \neq 0$ Terdapat pengaruh dalam Pengendalian Pengolahan Informasi terhadap Realisasi Anggaran.
3. $H_o : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh dalam Pengendalian Fisik terhadap Realisasi Anggaran.

- Ha : $\rho \neq 0$ Terdapat pengaruh dalam Pengendalian Fisik terhadap Realisasi Anggaran.
- 4 Ho : $\rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh dalam Review Kinerja terhadap Realisasi Anggaran.
- Ha : $\rho \neq 0$ Terdapat pengaruh dalam Review Kinerja terhadap Realisasi Anggaran.
- 5 Ho : $\rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh dalam Aktivitas Pengendalian Internal terhadap Realisasi Anggaran.
- Ha : $\rho \neq 0$ Terdapat pengaruh dalam Aktivitas Pengendalian Internal terhadap Realisasi Anggaran.

